

**FEMINISME DAN KETAHANAN BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA DALAM
PERSPEKTIF ORGANISASI ISLAM WANITA
(Studi pada Pimpinan Pusat Nasyiatul 'Aisyiyah Periode 2012-2016)**

Rendy Adiwilaga

Dosen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Bale Bandung Jl. RAA Wiranatakusumah No. 7, Kab. Bandung

Email: rendyadiwilaga@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian mengenai posisi gerakan organisasi keputrian Islam yang di wakikan Nasyiatul 'Aisyiyah dalam menyikapi isu feminisme, serta Implikasinya terhadap ketahanan budaya, khususnya budaya perempuan Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi maraknya isu kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta stagnansi perbaikan nasib perempuan itu sendiri. Selain itu penelitian ini juga di latarbelakangi oleh sebuah pertanyaan besar, yakni bagaimana Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai organisasi keputrian Islam menyikapi ideologi luar yang disinyalir telah mampu memecah pemikiran kader ke dalam golongan-golongan yang berbeda.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori organisasi dan tiga teori feminisme sebagai pisau analisis. Yakni feminisme liberal, feminisme sosialis-Marxis, dan feminisme radikal. Substansi dari ketiga teori tersebut ialah pembebasan perempuan yang harus dicapai melalui kemandirian dan penghancuran dominasi laki-laki dalam sektor domestik dan publik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bentuk utama dari Nasyiatul 'Aisyiyah sendiri yakni didorongnya kemandirian perempuan, advokasi perempuan sebagai nilai perjuangan utama, pendidikan sebagai landasan gerakan, serta kader *multitasking* sebagai identitas gerakan. Nasyiatul 'Aisyiyah juga memiliki kesamaan dengan dasar perjuangan kaum feminis liberal, hanya saja banyak kontradiksi dengan kaum feminis radikal yang bernegasi pada lembaga perkawinan dan agama. Nasyiatul 'Aisyiyah juga memiliki kemiripan perjuangan dengan kaum feminis sosialis-Marxis. Beberapa poin yang mengganggu ketahanan budaya ialah feminisme menganggap campur tangan agama sebagai penghambat perempuan, laki-laki sebagai pesaing perempuan, pemakluman lesbianisme, kecurigaan pada lembaga perkawinan, serta adanya impian tentang dominasi perempuan di masa depan.

Kata kunci: Gerakan Perempuan, Feminisme, Nasyiatul 'Aisyiyah, Ketahanan Budaya

PENDAHULUAN

Sebelum abad ke 16, perempuan (dalam konteks masyarakat kelas menengah) masih berada pada urutan sekunder perihal perbincangan strategis dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, terlebih lagi sosial. Adanya pengaruh gereja, konservatisme beberapa agama, serta budaya leluhur yang menempatkan wanita sebagai makhluk “pasif”, nyatanya telah menyudutkan perempuan pada posisi yang sangat sulit dan terpojok. Wanita seakan terjebak akibat adanya manifestasi patriarkal yang dihasilkan dari superioritas laki-laki serta kepentingan yang mengikutinya.

Bahkan pada kisaran tahun 1550-1700, tidak ditemukan peningkatan posisi perempuan dalam undang-undang. Perempuan bahkan dilarang mendapatkan pendidikan pada tingkat universitas. Saat seorang perempuan yang beruntung berada pada jajaran aristokrat serta lebih menikmati kekuatan dalam bidang sosial politiknya daripada seorang lelaki magang, ia tidak akan begitu menikmatinya daripada laki-laki yang berposisi sejajar dengannya. Beda halnya ketika seorang pria yang tengah magang menikmati kekuatan lebih dari perempuan yang berada pada status sosial yang sama. Selain itu, perempuan yang berumah tangga tidak memiliki hak atas anak-anaknya. Perkembangan, pendidikan dan pengaturan pernikahan menjadi hak ayah sepenuhnya. Di mata hukum, anak menjadi milik ayah, dan apabila orangtua berselisih atau bercerai, ayahnya bisa mencegah ibunya untuk menghubungi anak-anaknya (Gamble. 2010: 4-5). Kondisi-kondisi seperti itulah yang kemudian memprakarsai lahirnya gagasan feminis. Salah satu tokoh yang gencar menyuarakan kebangkitan perempuan ialah Mary Wollstonecraft.

Kesadaran kolektif terkait peran perempuan yang tidak boleh lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai aspek, mulai mengemuka pasca lahirnya tradisi tulis menulis pasca *renaissance* dan puncaknya pada Revolusi Industri dan Revolusi Prancis. Feminisme sebagai gerakan sendiri muncul diawali oleh kaum bangsawan yang menerima cara berpikir baru. Disusul gerakan buruh perempuan Paris pada saat meletusnya Revolusi Prancis tahun 1789. Di saat orang-orang terkemuka dalam dewan konstituante sibuk berdebat tentang konstitusi Prancis, kaum perempuan *sans-cullotes* (perempuan tukang cuci pakaian, penjahit, pelayan, gadis penjaga toko, serta istri kaum buruh laki-laki) mengeluhkan kelangkaan bahan makanan. Sekitar 6.000 perempuan bergerak menuju pusat kota Paris untuk menuntut roti murah (Marissa, 2007: 20-27).

Pergerakan perempuan dalam konteks berbeda terus menyebar ke seantero Eropa, bahkan hingga ke Rusia pada abad ke -20 yang secara langsung melahirkan warna baru feminisme, yaitu feminisme marxis-sosialis. Terlebih lagi pada dekade-dekade berikutnya, seiring dengan perkembangan zaman, muncul konsepsi feminisme baru seperti feminisme psikoanalisis, feminisme eksistensial, hingga ekofeminisme dan post-feminisme.

Warna global gerakan perempuan dunia juga memberikan pengaruh cukup besar pada perubahan paradigma gerakan perempuan Indonesia. Namun, sebelum isu feminisme mendunia, nyatanya banyak pejuang-pejuang wanita yang berasal dari berbagai daerah, mampu tidak hanya memperjuangkan kehormatan dirinya sendiri (seperti apa yang dijunjung tinggi Wollstonecraft dalam bukunya *Vindication*), melainkan juga mampu menjunjung tinggi nama daerahnya sendiri. Salah satu contoh ialah keberhasilan raja-raja perempuan di Aceh yang memerintah kesultanan Aceh pada abad ke 18. Satu-satunya kemunduran kerajaan lebih dikarenakan sepucuk fatwa dari Mekkah yang menyatakan bahwa sultan yang berasal dari jenis kelamin perempuan adalah terkutuk (Baha'uddin, 2010: 5), yang tidak lebih berasal dari monopoli penafsiran laki-laki tentang kekuasaan.

Sama halnya dengan perkembangan peradaban dunia sebelumnya, Adat, konservatisme agama, serta aspek sosial budaya merupakan pengganjal eksistensi perempuan nusantara pada masa pra kemerdekaan. Pada masa penjajahan kolonial, perempuan hanya dinilai sebagai komoditas pendongkrak status sosial, terlebih jika perempuan tersebut berasal dari kalangan ningrat. Dengan menikahi perempuan ningrat, seorang anak yang terlahir akan mendapatkan gelar raden mas, yang selanjutnya berangsur-angsur akan berubah menjadi raden. Setelah mencapai gelar raden inilah, seorang anak nantinya dapat dipromosikan menjadi bupati, dan kemudian anak bupati kelak juga akan menggunakan nama raden seperti halnya ayahnya (Baha'uddin, 2010:29). Rapuhnya ketahanan budaya wanita Indonesia pada masa itulah yang kemudian menjadi dasar perjuangan wanita-wanita Indonesia yang berjuang melalui jalur pendidikan. Konsepsi tersebut dipelopori oleh R.A Kartini yang kemudian surat-suratnya dibukukan dalam judul *Door Duisternis Tot Licht* (Nugroho, 2008: 89).

Secara garis besar, perjuangan perempuan pada periode pra-kemerdekaan dibagi ke dalam beberapa bentuk. Pertama, perjuangan perempuan yang dilakukan melalui jalan peperangan, seperti Raden Ayu Ageng Serang, Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, dan beberapa

pejuang perempuan lainnya. Selain itu, ada juga generasi berikutnya yang melakukan perjuangan melalui pendidikan, seperti R.A Kartini, M.W Maramis, Dewi Sartika, Nyai Achmad Dahlan, Hajjah Rasuna Said, Rahmah El Yunusiyah, dan beberapa tokoh lainnya (Baha'uddin, 2010:38).

Pergerakan wanita, khususnya dalam hal pendidikan pada masa pra-kemerdekaan, mengalami perkembangan yang cukup apik pada masanya. Salah satunya ialah Dewi Sartika. Di usianya yang baru menginjak umur 10 tahun, beliau telah mampu mengembangkan pendidikan bagi masyarakat perempuan Jawa Barat. Begitu pula Roehana Koeddoes. Sejak usia 8 tahun, beliau berhasil mendidik masyarakat sekitar rumahnya. Bahkan kemudian Roehana berhasil mendirikan Sekolah Keradjaan Amai Setia (KAS) pada 11 Februari 1911 serta aktif menulis di surat kabar *Soenting Melajoe*.

Berangkat dari pendidikan pula, lahirlah kemudian organisasi perempuan yang diprakarsai masyarakat lapisan menengah dan atas Indonesia. Organisasi yang pertama lahir ialah Putri Mardika pada tahun 1912. Organisasi ini mendorong perempuan agar berani tampil di depan umum, membuang rasa takut dan mengangkat perempuan pada kedudukan yang sama seperti laki-laki. Organisasi lain yang juga menyusul untuk berjuang diantaranya ialah Sarekat rakyat "merah" Sarekat Islam pimpinan Raden Sukaesih dan Munapsiah, kemudian Istri Sedar, lalu Aisyiyah (Berdiri pada tahun 1917), Wanodyo Utomo (berdiri pada tahun 1920), hingga Gerwani pada masa pasca kemerdekaan.

Dari sekian banyak organisasi kewanitaan yang lahir pada awal abad ke 20. Aisyiyah merupakan satu dari sekian organisasi yang konsisten aktif hingga detik ini. Aisyiyah sendiri lahir pada tanggal 22 April 1917 seiring didirikannya Muhammadiyah oleh KH Achmad Dahlan. Achmad Dahlan sendiri menyadari bahwa dalam menyelenggarakan sejumlah kursus mengenai perintah agama diperlukan bantuan perempuan. Nyai Achmad Dahlan, istri dari KH Achmad Dahlan sendiri kemudian ditunjuk menjadi ketua untuk pertama kalinya dalam organisasi ini. Nyai Achmad Dahlan juga mengutarakan bagaimana kondisi perempuan pada saat itu:

"Pandangan Islam yang menjamin kedudukan sama antara perempuan dan laki-laki (dalam beberapa hal terdapat sedikit perbedaan) ketika itu diabaikan. Dan ajaran Al-Quran yang memberi bimbingan tentang bagaimana sebenarnya perempuan harus bertingkah laku di rumah dan di dalam masyarakat, disingkirkan dan menjadi kata-kata mati belaka" (Wieringa. 2010: 121).

Pada tahun 1919, Muhammadiyah dan 'Aisyiyah mendirikan Siswa Praya Wanita, yaitu perkumpulan murid-murid putri di luar sekolah, yang pada tahun 1931 dalam kongres ke 20 di Yogyakarta nama itu diganti dengan Nasyiatul 'Aisyiyah. Nasyiatul 'Aisyiyah disiapkan agar hidup subur sebelum 'Aisyiyah itu patah, dan siap sedia sebagai penerus sebelum pendahulunya hilang atau menghadap yang maha esa.

Seiring perkembangan Nasyiatul 'Aisyiyah sebagai organisasi kepemudaan wanita dari Muhammadiyah, perkembangan gerakan feminisme dunia semakin dinamis. Setelah melewati beberapa gelombang pemikiran, feminisme nampaknya terus berkembang demi mendorong adanya kesamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Perjuangan pun menemukan titik cerah pasca perang dunia. Negara-negara demokrasi bermunculan, dan memberikan hak pilih bagi para wanita dalam politik. Pemerintah dari berbagai negara pun menyikapi isu wanita dengan serius. Keseriusan ini dapat dilihat dari perancangan bidang program pemerintah dalam bentuk instansi seperti pembentukan kementerian yang khusus mengurus program perempuan pada suatu negara.

Salah satu negara yang juga ikut intens memperhatikan kesejahteraan perempuan ialah Indonesia. Dari tahun ke tahun, isu kewanitaan menjadi perhatian pemerintah walaupun belum sepenuhnya maksimal. Kepemimpinan perempuan bahkan mencapai puncaknya ketika Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai presiden. Terlebih lagi sampai penelitian ini dirumuskan, KPU dan seluruh partai pun tengah dan telah memperjuangkan kuota 30% perempuan dalam kursi parlemen. Walaupun disisi lain, masih banyak kasus pendiskreditan terhadap perempuan baik atas dasar superioritas kaum lelaki dan inferioritas perempuan maupun atas dasar kepentingan ekonomi, yang sampai saat ini belum kunjung ditemukan pemecahan masalahnya, seperti kasus Marsinah, perkosaan etnis cina pada tahun 1998, hingga *trafficking* Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang masih berlangsung hingga detik ini. berangkat dari titik tolak permasalahan-permasalahan tersebut, muncul kesadaran kaum perempuan Indonesia untuk membela kehormatan kaum perempuan, bahkan menuntut persamaan hak dengan kaum lelaki dalam konteks sosial budaya.

Ketahanan budaya wanita Indonesia yang tercermin dari kemandirian dan eksistensinya sebagai subjek di berbagai aspek, kenyataannya masih menemui jalan buntu mengingat budaya yang mengakar di Indonesia sendiri merupakan budaya patriarkal. Istilah 'patriarkal' mengacu

pada hubungan kekuatan dimana kepentingan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Hubungan kekuatan ini memiliki banyak bentuk; mulai dari penggolongan pekerjaan menurut jenis kelamin dan pemberdayaan dalam organisasi sosial, hingga norma femininitas yang diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kekuatan patriarkal bertumpu pada makna sosial yang berdasar pada jenis kelamin (Gamble, 2010: 3-4). Sehingga, jika menilik pada kasusnya di Indonesia, terdapat dua faktor yang saling berseberangan dan menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yakni kemandirian wanita sebagai sebuah keharusan yang dijewantahkan melalui feminisme, serta norma agama yang secara tidak langsung mendukung budaya patriarkis yang mengakar di bangsa ini.

Titik fokus yang menjadi perhatian dari penelitian ini kemudian ialah, bagaimana Naisiyatul 'Aisyiyah yang notabennya merupakan gerakan kewanitaan dalam bentuk organisasi kepemudaan wanita berasaskan panji Islam, menyikapi ledakan perkembangan pemikiran feminisme, yang saat ini banyak disuarakan oleh aktivis-aktivis kewanitaan untuk menyikapi permasalahan perempuan yang belum kunjung usai di negeri ini.

TERMINOLOGI FEMINISME DAN VARIANNYA

Sebuah definisi umum yang dikemukakan Sarah Gamble dalam bukunya "Feminisme dan Post-feminisme" (Gamble, 2010: 1), menyebutkan bahwa feminisme merupakan sebuah kepercayaan dimana perempuan –semata-mata karena mereka adalah perempuan- diperlakukan tidak adil dalam masyarakat yang dibentuk untuk memprioritaskan cara pandang laki-laki serta kepentingannya. Dalam pola patriarkal, perempuan menjadi semua hal yang bukan laki-laki (atau citra yang tidak diinginkan laki-laki); dimana laki-laki dianggap kuat, perempuan lemah; laki-laki dianggap lebih rasional dan perempuan emosional; laki-laki dianggap lebih aktif, perempuan pasif; dan sebagainya.

Perempuan diartikan dalam definisi yang dikemukakan Gamble sebagai makhluk kelas dua dan bersifat inferior. Artinya perempuan masih berada satu tingkat di bawah laki-laki. Akibat budaya yang dibentuk oleh kaum laki-laki, seluruh identitas perempuan seperti emosional, mengutamakan perasaan, serta tidak mampu bekerja kasar, dianggap sebagai sifat-sifat yang keliru dan pantang oleh laki-laki dianut.

Perspektif lain juga kemudian dikemukakan oleh Gerda Lerner. Lebih jauh lagi, Lerner mengemukakan bahwa feminisme dapat mencakup baik gerakan hak-hak perempuan maupun emansipasi perempuan. Ia mendefinisikan kedua posisi tersebut sebagai gerakan hak-hak perempuan yang berarti sebuah gerakan yang peduli dengan kemenangan bagi kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam semua aspek masyarakat dan memberi mereka akses pada semua hak-hak dan kesempatan-kesempatan yang dinikmati laki-laki dalam institusi-institusi dari masyarakat tersebut. (Lerner, 1986: 235-237). Artinya disini, Lerner menekankan bagaimana nilai murni perjuangan dari feminisme itu sendiri, yakni sebuah gerakan dan sikap yang konsisten memperjuangkan hak-hak dasar wanita dalam hal kesetaraan dengan laki-laki.

Semua pemikiran tentang subordinasi perempuan dan gerakan-gerakan tersebut, pada dasarnya berangkat dari persoalan-persoalan mendasar yang banyak direnungkan kaum feminis di awal kelahirannya. Persoalan mendasar yang dipermasalahkan oleh feminisme (Ritzel, 2003: 404-405) nyatanya berputar pada empat pertanyaan, diantaranya ialah (1) bagaimana dengan perempuan?; (2) mengapa semua ini terjadi?; (3) bagaimana kita dapat mengubah dan memperbaiki dunia sosial untuk membuatnya menjadi tempat yang lebih adil untuk perempuan dan semua orang?; dan terakhir (4) bagaimana dengan perbedaan di antara perempuan?

Idealnya, feminisme memiliki sikap dalam menuntaskan hegemoni patriarki, yaitu harus dimulai dengan memfungsikan kembali kesadaran mendasar wanita sehingga setiap wanita mengakui nilai dan kekuatan dirinya sendiri; menolak tekanan patriarki yang melihat diri wanita itu lemah, tergantung, dan kelas dua; dan bekerja dalam kesatuan wanita lain, menggalang semangat persaudaraan saling percaya, dan saling membela (Ritzel, 2003:433). Hal tersebut sejatinya merupakan dasar atau inti utama dari pemikiran feminisme secara general.

Terdapat banyak sekali jenis varian feminisme yang masing-masing darinya memiliki karakteristik tersendiri. Beberapa varian feminisme sendiri di antaranya ialah feminisme liberal, radikal, marxis-sosialis, ekofeminisme, eksistensialis, psikoanalisis, hingga post-feminisme. Penelitian ini kemudian lebih mengutamakan feminisme liberal, marxis-sosialis, dan radikal sebagai pisau analisis utama. Mengingat ketiga feminisme tersebut merupakan jenis feminisme yang sampai saat ini masih ramai diperbincangkan dan diperdebatkan, terlebih digunakan sebagai landasan organisasi keperempuanan serta diskursus-diskursus ilmiah. Berikut merupakan penjelasan ketiga varian feminisme tersebut.

Feminisme liberal merupakan varian feminisme yang bisa di bilang merupakan feminisme yang pertama kali dirumuskan sebagai sebuah konsep pemikiran. Sistem patriarkis, campur tangan agama, serta kurangnya pendidikan bagi perempuan merupakan deretan faktor yang melatarbelakangi lahirnya feminisme liberal. Tokoh aliran ini di antaranya ialah Margaret Fuller, Harriet Martineau, Angeline Grimke, dan Susan Anthony. Feminisme liberal berakar pada tradisi berpikir liberal barat yang berpilar pada rasionalisme, liberalisme, dan individualisme. Allison Jaggar dalam *Feminist Politics and Human Nature*, mengamati bahwa pemikiran politik liberal memandang manusia unik karena kapasitas nalarnya. Kaum liberal mendefinisikan nalar sebagai kemampuan untuk menentukan cara terbaik dalam mencapai tujuan yang diinginkan, karenanya kepuasan dianggap penting (Suwardi Hasan, 2011: 238). Dari hasil pemikiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa nalar merupakan kekuatan utama dari pemikiran feminisme liberal itu sendiri.

Ajaran pokok feminisme liberal adalah setiap individu, laki-laki atau perempuan, memiliki hak-hak yang sama dan mestinya tidak ada penindasan antara satu dengan yang lainnya. Kapasitas pemikiran rasional laki-laki dan perempuan setara sehingga perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam membuat keputusan dan menentukan pilihan-pilihan terbaiknya (Kadarusman, 2005: 28). Pengertian tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa tidak ada batasan setipis mungkin antara laki-laki dan perempuan khususnya dalam hal kebebasan berpikir dan memaksimalkan nalar dalam setiap aktivitas. Pengertian tersebut juga seakan mencoba membantah pola pikir yang menegaskan bahwa laki-laki menggunakan akal, dan perempuan hanya menggunakan perasaan.

Seperti konsep liberal atas sifat manusia yang hadir di dalam pemikiran feminis liberal, konsep Marxis atas sifat manusia juga hadir dalam pemikiran **feminis Marxis-Sosialis**. Dalam tulisannya yang berjudul *Introduction to Marx and Engels* (Tong, 1998: 140), Richard Schmitt bersikeras bahwa pernyataan “manusia menciptakan dirinya sendiri” bukanlah untuk dibaca sebagai “laki-laki dan perempuan, secara individu menciptakan diri mereka sendiri”, melainkan harus dibaca sebagai “laki-laki dan perempuan, melalui produksi, secara kolektif menciptakan masyarakat yang, pada gilirannya, membentuk mereka menjadi seperti sekarang”

Walaupun banyak kesamaan antara feminis marxis dan sosialis, namun perlu diperhatikan bahwa antara keduanya terdapat suatu pembeda yang tegas. Feminis sosialis

menekankan bahwa penindasan gender di samping penindasan kelas adalah merupakan sumber penindasan perempuan. Sebaliknya, feminis marxis berargumentasi bahwa sistem kelas lebih bertanggung jawab terhadap diskriminasi fungsi dan status.

Penindasan terhadap perempuan, menurut aliran Marxis, bukanlah akibat dari tindakan individual yang disengaja, melainkan hasil dari struktur politik, sosial, dan ekonomi yang dibangun dalam sistem kapitalisme. Aliran ini meyakini bahwa sistem kelas dan sistem kapitalisme telah menyebabkan ketidaksetaraan perempuan (Beauvoir, 1993: 56). Jadi bukan hanya patriarkisme seperti apa yang digadang-gadang para pemikir sebelumnya tentang musuh bersama feminisme. Di pemikiran feminisme Marxis, kapitalis lah yang menjadi biang keladi merosotnya produktifitas perempuan dalam peradaban manusia dewasa ini.

Feminis Marxis percaya bahwa eksistensi sosial menentukan kesadaran. Komentar bahwa “pekerjaan perempuan tidak pernah selesai” bagi feminis Marxis adalah lebih dari sekedar aforisme (Tong, 1998: 141); komentar itu merupakan gambaran dari sifat pekerjaan perempuan. Dengan selalu siap bertugas, seorang perempuan membentuk konsepsi dirinya yang tidak akan dimilikinya jika perannya di dalam keluarga dan di tempat kerja tidak menahannya untuk tetap subordinat pada laki-laki, baik secara sosial maupun ekonomi.

Di masa berikutnya, pemikiran feminisme Marxis-Sosialis untuk perempuan mengilhami konsep pendidikan yang sama di berbagai belahan dunia. Kalau ada yang mengatakan konsep sosialisme telah habis, harap mengevaluasi pendapat mereka. Hingga sekarang aliran ini hidup di berbagai aktivitas sosial politik di berbagai negara.

Terakhir ialah Feminis Radikal. Perintis aliran ini adalah Charlotte Perkins Gilman, Emma Goldman dan Margaret Sanger. Mereka mengatakan bahwa perempuan harus melakukan kontrol radikal terhadap tubuh dan kehidupan mereka. Feminisme radikal kontemporer kemudian berkembang pesat pada tahun 1960-an dan 1970-an di New York, Amerika Serikat.

Menurut Gadis Arivia (Arivia, 2006: 101-102), inti gerakan feminis radikal adalah isu mengenai ketertindasan perempuan. Mereka mencurigai bahwa penindasan tersebut disebabkan oleh adanya pemisahan ruang lingkup privat dan lingkup publik, artinya lingkup privat dinilai lebih rendah daripada lingkup publik, dimana kondisi ini memungkinkan tumbuh subur patriarki. Dalam konsep feminisme radikal, tubuh dan seksualitas memegang esensi yang sangat

penting. Hal ini terkait dengan pemahaman bahwa penindasan diawali melalui dominasi atas seksualitas perempuan dalam lingkup privat.

Kaum feminis radikal cenderung menilai bahwa laki-laki dan seluruh budaya patriarkalnya merupakan biang keladi ketertindasan perempuan di berbagai belahan dunia. Segala sistem mulai dari perundang-undangan hingga tata cara berkeluarga, jika itu dirumuskan oleh laki-laki, dianggap oleh kaum feminis radikal sebagai “kebohongan dan kejahatan besar”. Kaum feminis radikal sama sekali tidak menganggap laki-laki sebagai mitra, melainkan sebagai pesaing, terlebih sebagai sosok yang mengancam keberadaan mereka. Mary Daly, salah satu penganut feminis radikal sekaligus pengikut filsafat Nietzsche, bahkan berpikiran bahwa “perempuan yang dianggap jahat oleh patriarki adalah sesungguhnya baik, sementara perempuan yang dianggap baik sesungguhnya adalah buruk”

Secara garis besar, Feminisme radikal sendiri didasarkan atas dua keyakinan sentral (Ritzel, 2003:433): (1) bahwa wanita mempunyai nilai positif mutlak sebagai wanita, suatu keyakinan yang ditegaskan untuk menentang apa yang mereka nyatakan sebagai devaluasi wanita universal; dan (2) bahwa wanita dimana-mana ditindas oleh sistem patriarki. Feminis radikal melihat bahwa di dalam setiap institusi dan struktur masyarakat yang paling mendasar, terdapat sistem penindasan dimana orang tertentu mendominasi orang lain, baik itu antarseks (jenis kelamin), kelas, kasta, etnis, umur, dan warna kulit). Struktur penindasan paling mendasar terdapat dalam sistem patriarki.

Dalam tubuh feminisme radikal sendiri nyatanya terjadi perpecahan, yaitu radikal libertarian dan radikal kultural. Feminisme radikal libertarian memberikan perhatian lebih pada konsep isu-isu feminim, pada hak-hak reproduksi dan peran seksual. Menurut kelompok ini, solusi atas masalah ini adalah dengan mengembangkan ide androgini, yaitu sebuah model yang mempromosikan pembentukan manusia seutuhnya dengan karakteristik maskulin – feminim. mengenai seksualitas, paham ini menekankan agar perempuan dapat menikmati semua jenis kegiatan seksual, termasuk lesbian (Nugroho, 2008: 68-69). Di lain pihak, feminis radikal kultural bersikeras pada proposisi yang menyatakan bahwa perempuan seharusnya tidak seperti laki-laki, dan tidak perlu bagi perempuan untuk berperilaku seperti laki-laki. Kaum feminis radikal kultural mencegah penerapan nilai-nilai maskulin yang secara kultural dikenakan pada

pria, misalnya kebebasan, otonomi, intelektual, kehendak, dominasi, budaya, transedensi, perang dan kematian. (Arivia, 2006: 108).

BUDAYA PEREMPUAN INDONESIA DAN KONSEP INDONESIA MENURUT ORGANISASI KEPUTRIAN ISLAM

Berbicara tentang budaya perempuan Indonesia, sungguh tidak bisa digeneralisir dan dipukul rata jika kita mengkaitkannya dengan dimensi waktu. Kondisi perempuan Indonesia baik pra kemerdekaan dan pasca-kemerdekaan berlainan satu sama lain. Pada masa pra-kemerdekaan, perempuan Indonesia bisa dibilang benar-benar tenggelam dalam budaya patriarkis yang amat kental. Gambaran perempuan Indonesia dapat diwakilkan oleh beberapa tulisan R.A Kartini yang digambarkan sebagai perempuan yang terpenjara dalam budaya.

Tidak hanya surat-surat Kartini, Pramoedya Ananta Toer dalam tetraloginya berjudul "Bumi Manusia" juga menjelaskan bagaimana kondisi perempuan pada masa kolonial. Representasi perempuan Indonesia bisa disaksikan melalui wujud Sanikem, seorang tokoh perempuan yang termarginalisasi akibat tak dapat berbuat apa-apa ketika ayahnya yang gila jabatan menjual dirinya seharga 25 gulden pada administrator pabrik gula. Sejak saat itulah dia berubah menjadi Nyai Ontosoroh, seorang istri tidak sah, bergantung dan tak berdaya di bawah naungan lelaki Belanda.

Baru lah pasca kemerdekaan, karakteristik wanita Indonesia mulai mengemuka pasca lembaga-lembaga seperti Aisyiyah dan Gerwani melancarkan kegiatan pemberdayaannya. Pasca kemerdekaan juga, Soekarno merumuskan sebuah pemikiran yang tersusun dalam naskah berjudul "Sarinah". Soekarno bahkan merumuskan perempuan ideal Indonesia. Menurutnya:

"Satu-satunya jalan yang benar ialah jalan yang bukan saja menuju kepada hilangnya pertentangan antara dua hal, cinta dan keibuan serta pekerjaan, tetapi malah kepada sintesis dua hal itu,- jalan yang menuju ke tempat di mana dua hal itu kedua-duanya dapat dipenuhi bersama-sama, dalam suasana isi-mengisi kebahagiaan masing-masing." (Soekarno, 2014: 240).

Soekarno mengartikan bahwa perempuan Indonesia merupakan perempuan yang mandiri, tidak tergantung pada apapun terlebih pada suami. Selain itu juga, perempuan Indonesia adalah

perempuan yang memiliki rasa kasih sayang dan cinta keibuan yang dalam, yang berguna dan dibutuhkan bagi anak-anak serta suaminya. Perempuan Indonesia juga merupakan perempuan yang tidak ragu untuk menyertakan pekerjaan, terutama pekerjaan sosial dalam setiap agenda sehari-harinya. Keduanya diharapkan dapat memaksimalkan peran perempuan. Selain dibutuhkan di keluarga, juga dibutuhkan dalam setiap organisasi.

Puncak mobilitas perempuan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat terjadi sekitar tahun 1950-1960-an. Namun pasca meletusnya gerakan 30 September, Gerwani dalam organisasi perempuan lain yang dinilai berbahaya mulai di bredel. Menurut Saskia Wierenga dalam bukunya "Penghancuran Gerakan Perempuan" :

"Semangat perempuan revolusioner yang banyak dikumandangkan pada masa orde lama berangsur-angsur musnah manakala kekuasaan orde baru mencengkeram. Selama 32 tahun ruang gerak perempuan dalam bersuara dan berpolitik di bungkam." (Wierenga, 2010: 545).

Pasca kebangkitan Orde Baru, perempuan mengalami krisis identitas. Perempuan hanya sebatas gerakan pelengkap suami yang terciptakan melalui Dharma Wanita. Aktivitas-aktivitas yang progresif dinilai oleh penguasa sebagai sebuah ancaman. Hasilnya kemudian perempuan hanya bisa aktif di lembaga-lembaga pengajian dan Dharma Wanita itu sendiri. Perlakuan tersebut secara gamblang Julia Suryakusuma sebut sebagai Ibuisme Negara (*State Ibuism*). Secara singkat, peran perempuan dirumuskan oleh pemerintah orde baru dalam panca dharma perempuan yaitu :

1. Perempuan sebagai istri pendamping suami;
2. Perempuan sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda;
3. Perempuan sebagai pengatur ekonomi rumah tangga;
4. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan; dan
5. Perempuan sebagai anggota masyarakat.

(Rahayu, dalam prisma edisi 5 Mei 1996)

Budaya Indonesia yang secara kental dipengaruhi oleh etika Islam karena penduduknya yang sebagian besar didominasi oleh penganut agama Islam, menjadikan kedudukan dan peran perempuan juga turut terbentuk dengan mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran

Islam. Hal ini lah yang sejak dulu hingga sekarang masih tetap bertahan, yakni nilai agama dalam budaya perempuan Indonesia. Beberapa daerah bahkan secara terang-terangan menggunakan asas Islam sebagai landasan pemerintahannya. Beberapa daerah tersebut ialah Aceh dengan hukum syariat Islamnya, serta Sumatera Barat dengan landasan filosofis minangnya yang berbunyi "*Adat basandi Syara, syara basandi kitabullah*". Keanekaragaman tafsiran dalam memahami keislaman di beberapa wilayah nusantara nyatanya juga berdampak pada bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan. Sebagian budaya masih memperlakukan perempuan sebagai objek. Lain halnya dengan beberapa daerah yang terbilang cukup maju, masyarakat disana cenderung memiliki kesadaran akan peran dan posisi perempuan.

Baru lah setelah reformasi, posisi perempuan sedikit bergerak ke arah yang lebih baik. Adanya redefinisi pembangunan yang mendorong perempuan untuk disertakan membuat perempuan memiliki ruang gerak yang lebih besar. Sayangnya, kondisi perbaikan nasib perempuan masih menghadapi banyak ganjalan. Data yang dikemukakan David, tokoh Rumah Baca Komunitas (RBK) menyebutkan bahwa sejak tahun 1999 hingga 2009, masih terdapat 134 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini juga dipertegas oleh pendapat dari Ketua Umum Nasyyiatul 'Aisyiyah, Norma Sari:

"Relasi laki-laki dan perempuan di Indonesia masih diwarnai budaya patriarkhi yang dibungkus dengan dogma agama yang kurang tepat misalnya dalam agama Islam budaya patriarki dibungkus dengan ayat dan hadits yang misoginis maupun penafsiran misoginis. Atau juga dibungkus dengan pranata adat yang banyak mengekang kaum perempuan. Bahkan masih ada yang membungkus dengan bingkai hukum yang diskriminatif misalnya beberapa perda." (Wawancara dengan Norma Sari pada tanggal 18 Februari 2015, di Kediannya, Wirobrajan, Kota Yogyakarta).

Sejatinya, Nasyyiatul 'Aisyiyah memiliki patokan utama perihal karakteristik perempuan Indonesia seharusnya. Terlihat bahwa "kemandirian" menjadi panglima dan harga mati hukumnya bagi tujuan gerakan ini. kemandirian diharapkan menjadi karakter utama perempuan Indonesia. Mandiri dalam artian bebas dari ketergantungan, tidak takut terhadap tekanan dan memiliki kreatifitas dalam menguasai situasi. Nasyyiatul 'Aisyiyah melalui Chusnul Khotimah juga menekankan ada nya kemampuan memimpin bagi perempuan-perempuan Indonesia.

Perihal kemandirian ini, Dede Dwi dari Departemen Sosial kemudian menjelaskan sebagai berikut :

“Pekerja keras, dan kemudian, secara teknis tidak ada perempuan yang menganggur. Itu kalau di Indonesia. Dan terbiasa tidak punya kepentingan. Kalo nikah ya nikah, kalo sekolah ya sekolah. Bukan sekolah biar dia pintar, bukan sekolah biar dia sukses.” (Wawancara dengan Dede Dwi pada tanggal 1 Februari 2015 di Dinas Sosial Kabupaten Sleman).

Ada satu poin tambahan tentang perempuan Indonesia dalam kaca mata Nasyiatul ‘Aisyiyah, yakni bebas nilai. Persepsi ini berangkat dari argumen Dede Dwi tentang tujuan sekolah yang baru dikemukakan. Perempuan Indonesia artinya ialah perempuan mandiri dan bebas nilai yang memiliki kemampuan mengatur sendiri kehidupannya tanpa intervensi keluarga maupun lingkungan.

Layin Fauziah dari Departemen Pengembangan Organisasi kemudian mencoba melengkapi, menurutnya :

“Ya perempuan indonesia ya perempuan yang mengikuti ajaran agama Islam. Mau dia berkegiatan kesana kesini bahkan sampai dunia internasional sekalipun, agama tetap dipegangnya. Dan ajaran agamanya itu seperti apa ya harusnya bagi yang menjalani harus sudah tau. tetep aturan-aturan itu jangan sampai lepas. Meskipun sosok kita yang melanggar. Tapi jangan sampai bablas. Saya kira itu idealnya. Ya sama dengan yang lainnya, intinya tetep harus memegang agama.” (Wawancara dengan Layin Fauziah pada tanggal 6 Maret 2015 di SD Muhammadiyah Bausasran, Kota Yogyakarta).

Layin Fauziah di sini menambahkan bahwa, sejauh apapun karakter yang dikembangkan oleh perempuan-perempuan Indonesia, agama merupakan syarat vital sebagai pedoman. Perempuan Indonesia merupakan perempuan, seperti apa yang ditanamkan sejak dulu, yakni perempuan yang berkegiatan berasaskan asas-asas Islam dan tidak keluar dari koridor Islam itu sendiri.

Perlu ditekankan kemudian bahwa indikator terakhir, yakni berpedoman agama, bukan berarti menekankan bahwa agama itu sendiri haruslah Islam, atau dengan kata lain, perempuan

Indonesia bisa disebut sebagai perempuan jika pedomannya hanya agama Islam. Berpedoman pada agama sendiri peneliti artikulasikan dalam cakupan yang luas tidak hanya Islam saja. Jadi yang menjadi pusat perhatian atau objek material dalam diskursus ini bukanlah apa agamanya, melainkan ada atau tidaknya agama dalam benak perempuan Indonesia.

Berangkat dari beberapa pandangan tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa perempuan Indonesia adalah perempuan yang :

1. Mandiri, dalam artian tidak bergantung pada ekonomi terpusat suami dalam keluarga;
2. Kreatif dan inovatif, artinya memiliki semangat dan jiwa-jiwa perubahan dalam menyikapi berbagai fenomena;
3. Memiliki jiwa pemimpin, sehingga perempuan mampu membuktikan kepada khalayak bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama, sekaligus mampu membantah asumsi patriarkis yang saat ini berkembang;
4. Bebas nilai, artinya perempuan memiliki hak penuh dalam menentukan arah dan kehidupan privatnya;
5. Berpedoman pada agama, hal ini ditujukan untuk memberikan arahan bagi perempuan untuk berkehidupan ke arah yang lebih baik.

NASYIATUL 'AISYIYAH DAN FEMINISME

Pada hakikatnya, feminisme liberal merupakan salah satu jenis feminisme yang mengedepankan kebebasan individu dalam setiap perjuangannya, diikuti oleh perjuangan kesetaraan hak dalam bentuk pendidikan, perundang-undangan, dan sektor publik lainnya yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi di dalamnya. Inti dari gerakan ini di antaranya ialah dituntutnya kesetaraan atau persamaan hak antara perempuan dan laki-laki, anggapan bahwa kapasitas nalar laki-laki dan perempuan layak disamakan, keunggulan nalar yang menjadi kunci perbaikan nasib bagi perempuan, serta pertanyaan-pertanyaan mendasar seputar campur tangan agama dalam kehidupan perempuan.

Menjadi sebuah isu yang sangat menarik ketika kebebasan, pendidikan, dan seluruh instrumen feminisme liberal sekilas sejalan dengan cita-cita dan bentukperjuangan Nasyyiatul 'Aisyiyah sebagai gerakan perempuan yang memiliki prinsip moderat dan islami, semakin seru lagi ketika asas islami Nasyyiatul 'Aisyiyah dibenturkan dengan hal-hal yang oleh kaum

feminisme liberal sendiri dipertanyakan perannya, yakni agama. Lantas bagaimana pandangan Nasyyiatul 'Aisyiyah menyikapi feminisme liberal itu sendiri?

Benar sekali ketika dikatakan feminisme liberal menjunjung tinggi pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan, hal ini dikuatkan oleh pendapat Betty Friedan, seorang feminis liberal gelombang kedua yang cukup terkemuka. seperti yang dikutip dalam bukunya *The Feminist Mystique* (1963), pendidikan merupakan jalan keluar pengekangan aktivitas perempuan, disisi lain, tepat sekali ketika muncul argumen yang menyebutkan bahwa Nasyyiatul 'Aisyiyah merupakan gerakan atau organisasi yang berdiri sejajar berjuang untuk pendidikan bagi perempuan. Hal ini semakin dikuatkan dengan pendapat dari ketua umum Nasyyiatul 'Aisyiyah:

“(Pendidikan) penting sekali karena dalam Al-Quran ditegaskan menuntut ilmu itu wajib hukumnya baik laki-laki maupun perempuan. Salah satu ukurannya adalah pendidikan. Pendidikan merupakan usaha untuk mencerahkan kaum perempuan.”
(Wawancara dengan Norma Sari pada tanggal 18 Februari 2015, di Kediannya, Wirobrajan, Kota Yogyakarta).

Dalam tubuh feminisme liberal sendiri, feminisme liberal pada dasarnya terjebak dalam suatu renungan, yakni dapatkah perempuan menjadi seperti laki-laki, apakah perempuan menginginkannya, dan apakah perempuan harus menginginkannya (Tong, 1998: 52) sayangnya pertanyaan-pertanyaan tersebut malah menyerang balik menjadi suatu kritik bagi feminisme liberal itu sendiri. Sebelum mengkritisi lebih jauh mengenai anomali feminisme liberal, ada salah satu poin penting yang perlu digali melalui argumen para pimpinan Nasyyiatul 'Aisyiyah, yakni perihal patutkah kapasitas rasional perempuan disamakan dengan kapasitas rasional laki-laki. Sebuah isu utama dimana hal tersebut merupakan hal esensial dalam tubuh feminisme liberal itu sendiri.

Dituntutnya pematihan argumen mengenai klasifikasi kapasitas rasional disinyalir berangkat dari adanya tuntutan kesetaraan atau persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perempuan dari kaum feminis liberal membutuhkan pengakuan lebih perihal kemampuannya dalam mengisi kegiatan sektor publik. Dari berbagai kasus lapangan yang telah dikemukakan sebelumnya, hampir semuanya menggambarkan tuntutan

kesetaraan. Menjadi sebuah pertanyaan besar kemudian, apakah memang diperlukan sebuah kesetaraan hak antara perempuan dan laki-laki?

Menyikapi permasalahan ini, Ketua Umum Nasyiatul 'Aisyiyah memiliki pandangan umum. Menurutnya :

“Kesetaraan bukan berarti sama persis di semua hal. Ada kodrat yang membedakan. Tetapi ada pembagian peran gender yang disetarakan. Karena laki-laki dan perempuan diciptakan berbeda agar mampu saling menopang dengan peran masing-masing.” (Wawancara dengan Norma Sari pada tanggal 18 Februari 2015, di Kediannya, Wirobrajan, Kota Yogyakarta).

Menarik untuk disoroti perihal argumen Norma Sari terkait “pembagian peran gender yang disetarakan” dan “laki-laki dan perempuan diciptakan agar mampu saling menopang dengan peran masing-masing”. Argumen tersebut bisa dibilang sangat “liberal”. Kalimat seperti “saling menopang dengan peran masing-masing” lah kemudian yang membedakan feminis liberal dengan feminis radikal yang lebih menekankan dominasi dan meminggirkan kerjasama dengan laki-laki. Terlebih lagi terdapat “pembagian peran”, yang bisa dibilang merupakan salah satu pokok perjuangan dari para kaum liberal. Norma Sari secara tak langsung menjelaskan secara eksplisit maksud dari kesetaraan hak yang para kaum feminis liberal idam-idamkan sejak lama.

Selain sebagai penguat argumen tentang kesetaraan, nyatanya agama juga menjadi batasan bagi perempuan, khususnya dalam konteks norma dan aturan keluarga. Adanya agama sebagai “penghambat” manuver perempuan, sejatinya menjadikan kaum feminis liberal mempertanyakan perlakuan khusus agama bagi perempuan. Perlakuan khusus disini bisa digambarkan pada ayat-ayat kitab suci yang secara khusus membahas norma-norma bagaimana seharusnya perempuan berperilaku. Islam sendiri mengartikulasikan fenomena ini dalam surat-surat seperti surat An-Nisa. Sama halnya dengan Bible yang banyak membahas perempuan, terutama pada ayat-ayat Yesaya, Efesus, Korintus, dan lain sebagainya.

Menyikapi permasalahan ini, Departemen Pendidikan Nasyiatul 'Aisyiyah kemudian mengkonfirmasi pernyataan sebelumnya tentang batasan dan peran agama di dalamnya, menurutnya :

“Saya sepakat kok ada aturan untuk perempuan. Karena mau bagaimanapun juga itu merupakan sesuatu yang ada untuk melindungi perempuan. Contohnya misalnya pakaian. Ada batasannya. Tetep.. karena di agama islam khususnya sudah jelas, ooh pakaian perempuan batasannya dari atas sampe bawah kecuali muka dan tangan. Kemudian jilbab dan sebagainya, itu memang perlu diatur, karena kalau tidak, itu akan bisa mempengaruhi yang lain. Salah satunya bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kalo menurut saya ini bukan wujud pendiskreditan agama terhadap perempuan, menurut saya bukan. Engga.” (Wawancara dengan Chusnul Khotimah pada tanggal 12 Februari 2015 di Kantor Majelis Perkaderan ‘Aisyiyah, Kauman, Kota Yogyakarta).

Nasyiatul ‘Aisyiyah diwakili Departemen Pendidikannya menilai justru agama bukanlah hal hegemonik yang memenjarakan ruang gerak perempuan dalam beraktifitas. Alih-alih memenjarakan, Nasyiatul ‘Aisyiyah justru berpikir bahwa aturan sebagai representasi warna agama malah melindungi perempuan dari disorientasi kehidupan. Agama di nilai merupakan pedoman legal bagi perempuan untuk berperilaku. Bukan sebaliknya yakni membatasi ruang gerak perempuan dalam berkegiatan.

pernyataan tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa agama bukanlah penghalang dalam ruang gerak perempuan. Adapun aturan dan batasan yang dirumuskan dalam ayat-ayat kitab suci, khususnya kitab suci agama Islam yakni Al-Quran, dirumuskan dengan tujuan untuk melindungi perempuan itu sendiri. Kedua informan tidak mencoba mengkritisi penyudutan ayat-ayat Quran terhadap perempuan karena menempatkan perempuan sendiri sebagai objek. Seperti apa yang selalu dikeluhkan oleh kaum feminis liberal dan radikal.

Pendapat lain tentang perlakuan khusus agama kemudian muncul dari Dede Dwi, Departemen Sosial Nasyiatul ‘Aisyiyah, menurutnya :

“Yaaa sebetulnya kan.. sebenarnya bukan perlakuan khusus ya, itu kan yang dianggap dibutuhkan, kenapa perlakuan khusus itu muncul karena itu dianggap diperlukan oleh perempuan, makanya agama menganggap... aku gatau kenapa yang dimunculkan selalu perempuan, padahal kan agama juga membahas perlakuan khusus untuk laki-laki, tapi orang lebih suka aja munculin yang perempuan. Kalo pendapatku ya itu wajar dilakukan, karena kita selalu hidup di nilai-nilai. Intinya wajar. Namun terkadang tafsir nya yang

dilebih-lebihkan. Kadang ada perempuan harus pakai penutup sampai kaki pakai kaos kaki. Nah karena ada aturan itu, muncul *judgement*. *Judgement* nya itu terkadang berlebihan juga akhirnya. Aku sih masih menganggap tafsir itu yang bermasalah.” (Wawancara dengan Dede Dwi pada tanggal 1 Februari 2015 di Dinas Sosial Kabupaten Sleman).

Dari pendapat yang dikemukakan Dede Dwi, terdapat suatu bantahan terkait adanya pendapat yang menggunakan diksi “perlakuan khusus agama”. Dede Dwi berkeyakinan bahwa pengaturan yang membuahkan adanya subordinasi terhadap perempuan bukan berangkat dari substansi ayat-ayat kitab suci, melainkan dari tafsiran orang-orang terdahulu. Dede Dwi masih memiliki kesamaan pendapat dengan dua informan sebelumnya yang mengatakan bahwa agama mengatur perempuan untuk melindungi perempuan itu sendiri. kedua informan yang berbicara mengenai keterkaitan agama dengan tata cara hidup perempuan, tergolong kepada perempuan yang memandang positif apa yang diatur oleh agama, mereka bukanlah golongan feminis beragama yang menganggap agama terlalu menyudutkan perempuan, dan terlalu menganggap perempuan sebagai makhluk berbahaya yang jika diatur akan mendatangkan petaka. Dede Dwi bahkan memberikan perspektif baru sekaligus konfirmasi, bahwa Quran juga membahas tentang aturan bagi kaum laki-laki dan semua isu penyudutan posisi perempuan ini timbul lebih karena kekeliruan penafsiran ayat.

Penjelasan tentang kekeliruan penafsiran ayat juga termaktub dalam buku “Agama, Relasi Gender, & Feminisme” karya Kadarusman. Kadarusman menjelaskan dari sudut pandangan aktivis teologi feminisme, bahwa legitimasi teks-teks suci terhadap budaya patriarkal sudah terjadi pasca turunnya Quran melalui Rasulullah SAW. Dominasi laki-laki di dunia penafsiran dan kehidupan sosial politik memberi peluang yang lebar bagi masuknya penafsiran patriarkal. Bahkan menurut kuantitas, kebanyakan ahli tafsir dan ahli fiqh berjenis kelamin laki-laki. Padahal mereka harus menafsirkan teks-teks yang khas untuk perempuan. (Kadarusman, 2005: 65).

Terdapat dua simpulan menarik terkait Nasyyatul ‘Aisyiyah, kesetaraan, dan agama yang menaungi kesemuanya. Di sisi lain, Nasyyatul ‘Aisyiyah konsisten menjalankan semua kegiatan dan ideologi atau pemikiran mereka di bawah panji-panji Islam. Mereka patuh pada batasan-

batasan yang telah tersirat dalam kitab suci tanpa mempermasalahkan posisi mereka yang tergolong perempuan dan saat ini berada dalam bayang-bayang masyarakat kelas dua. Di luar itu semua, sebelum mereka membenturkan diri pada batasan agama, Nasyyiatul 'Aisyiyah memiliki konsepsi perjuangan duniawi yang cukup rapi dan mapan. Kesetaraan yang mereka junjung tinggi, khususnya di berbagai sektor publik serta lembaga terkecil bernama keluarga sedikit demi sedikit mampu menjauhkan Nasyyiatul 'Aisyiyah dari konsepsi konservatisme agama. Nasyyiatul 'Aisyiyah dengan cerdas mengakali pengaruh agama dalam kehidupan mereka sebagai sesuatu yang mendatangkan kebaikan, namun tidak terjebak pada kepatuhan semu dan lebih menggali semua anomali saat ini diakibatkan oleh oknum-oknum di luar agama. Sehingga kadar perjuangan Nasyyiatul 'Aisyiyah sendiri bisa dibilang aman dan tidak berlebihan.

Feminisme radikal bisa dibilang sebagai salah satu varian feminisme yang paling ekstrim. Mengingat penganut feminisme ini teramat sangat militan dalam memperjuangkan hak-haknya. Komposisi tuntutan mereka pun sangatlah keras. Isu yang mereka tuntut dan permasalahkan di antaranya ialah dominasi laki-laki yang menurut mereka sangat merugikan, adanya ketidakpercayaan pada lembaga perkawinan (*Notes from the Second Sex*, 1970), penuntutan kontrol tubuh bagi perempuan, dan yang paling dahsyat dari penganut aliran ini adalah mereka mendukung isu lesbian dan memimpikan keberpusatan perempuan sebagai basis masyarakat di masa depan. Kaum feminis radikal cenderung menggugat seluruh aspek kehidupan, mulai dari ayat agama yang dituduh patriarkal karena disusun oleh laki-laki, hingga peraturan pemerintah yang dituduh bualan kaum laki-laki. (Humm, 1986: 384).

Nasyyiatul 'Aisyiyah melalui pimpinan-pimpninan nya, memiliki pandangan berbeda dalam menafsirkan kontrol tubuh itu sendiri. Ada yang menafsirkan secara khusus tentang reproduksi, ada juga yang menafsirkannya secara luas, yakni kontrol akan tubuh secara keseluruhan yang dijaga melalui *hijab*. Melalui pembahasan tentang reproduksi, ternyata Ketua Umum Nasyyiatul 'Aisyiyah sendiri memiliki pandangan berbeda dengan konsepsi yang dipermasalahkan oleh kaum feminis radikal-kultural. Norma Sari tidak menempatkan kontrol tubuh sebagai sesuatu yang harus dikuasai sepenuhnya oleh perempuan. Ada batasan kodrati yang melingkari konsepsi tersebut.

Selain ketimpangan gender sebagai penyebab utama ketertindasan perempuan, kaum feminis radikal juga lebih jauh lagi menitikberatkan penindasan perempuan pada lembaga

perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu institusi yang harus dihancurkan. Keluarga dianggap kaum feminis radikal sebagai institusi yang melegitimasi dominasi pria sehingga kemudian wanita ditindas. (Kadarusman, 2005: 31).

Menanggapi teori ini, dari sekian pendapat pimpinan Nasyiatul 'Aisyiyah, hampir secara keseluruhan menolak konsepsi ini. salah satunya adalah dari Ketua Umum Nasyiatul 'Aisyiyah sendiri. Menurutnya:

“Jelas saya tidak setuju karena konsep relasi suami dan istri dalam lembaga perkawinan adalah berbagi peran” (Wawancara dengan Norma Sari pada tanggal 18 Februari 2015, di Kediannya, Wirobrajan, Kota Yogyakarta).

Jawaban singkat Norma Sari seakan hendak meyakinkan peneliti bahwa konsepsi perkawinan yang mereka anut ada kaitan erat dengan nilai perjuangan yang mereka lakukan terkait kesetaraan gender. “Berbagi peran” menjadi sorotan sekaligus landasan hipotesis tersebut. Jika benar secara keseluruhan pimpinan dan anggota Nasyiah berpikiran seperti itu, maka artikulasi dan implementasi perihal kesetaraan gender berhasil ditanamkan terlebih dahulu dari lembaga terkecil mereka sendiri, yakni keluarga.

Lantas apa Nasyiatul 'Aisyiyah juga memiliki impian yang sama dengan para penganut feminis radikal tersebut? Ketua Umum Nasyiatul 'Aisyiyah secara tegas mengutarakan pandangan yang melumpuhkan kekuatan keperpusatan perempuan dalam peradaban. Menurutnya:

“Saya kurang sepakat. Bagi saya bukan bagaimana mengunggulkan perempuan tetapi bagaimana perempuan didudukan sesuai harkat dan martabat kemanusiaanya. Dengan demikian perempuan akan berkiprah secara optimal mengemban berbagai peran.” (Wawancara dengan Norma Sari pada tanggal 18 Februari 2015, di Kediannya, Wirobrajan, Kota Yogyakarta).

Sekali lagi, jika dianalogikan dengan buah pikiran Soekarno dalam karyanya, “Sarinah”, Ketua Umum Nasyiatul 'Aisyiyah nampaknya memiliki keselarasan terkait lajur berpikir tersebut. Pasalnya, keduanya memiliki keyakinan bukan sistem matriarkatnya yang harus dibangun kembali, namun bagaimana menempatkan perempuan dalam sistem yang sudah ada,

agar dapat berdaya dan berkembang mempengaruhi zaman. Kritik Soekarno bagi kaum feminis radikal bahkan amat sangat lantang. Dalam bukunya, Beliau menganalogikan pembangunan kembali budaya matriarkis adalah sama dengan menghiasi dan mempercantik mayat dengan beragam macam bunga, seberapapun indahny, tetap saja mati.

Pada kesempatan yang berbeda, anggota Departemen Pendidikan Nasyiatul 'Aisyiyah juga memiliki pandangan yang serupa namun tak sama. Menurutnya :

“Kalo saya ngeliatnya tergantung ini ya.. kalo melihat tergantung publikasi pengakuan, pengakuan bahwa perempuan itu ternyata bisa kok menjadi tokoh, nah kalo itu.. perlu, gak apa-apa. Akan tetapi memang perlu juga disiapkan.. bukan sekedar dia mendominasi secara kuantitas, tapi yang harus disiapkan ya kualitas si perempuan itu sendiri. Kualitas pendidikannya, kualitas wawasannya, yaaa.. dari pribadinya dia harus bener-bener punya kapasitas di bidang itu.” (Wawancara dengan Chusnul Khotimah pada tanggal 12 Februari 2015 di Kantor Majelis Perkaderan 'Aisyiyah, Kauman, Kota Yogyakarta).

Artinya di sini jelas bahwa bukan masalah dominasi, terlebih secara kualitas, yang menjadi keharusan kaum perempuan dalam peradaban saat ini. Chusnul Khotimah dari departemen Pendidikan Nasyiatul 'Aisyiyah melengkapi pendapat ketua umumnya, yakni kualitas perempuan lah yang menjadi kunci lepasnya perempuan dari penindasan, bukan dominasi dan hal lain sebagainya, terlebih menghancurkan budaya lama yang saat ini sudah dianggap sebagai suatu kewajaran.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, Nasyiatul 'Aisyiyah menyikapi feminisme sebagai sebuah paham memiliki hal-hal positif yang sejalan dengan dasar perjuangan Nasyiatul 'Aisyiyah itu sendiri. Contohnya ialah kemandirian perempuan yang menjadi dasar utama perjuangan Nasyiatul 'Aisyiyah, juga merupakan inti perjuangan yang diperjuangkan oleh feminisme. Selain itu, ada nya usaha memperbaiki ketimpangan gender, kesadaran pendidikan bagi perempuan, kesehatan reproduksi, dan lain sebagainya, juga menjadi kesamaan perjuangan antara ideologi feminisme dan Nasyiatul 'Aisyiyah, walaupun kemudian instrumen lain dari feminisme seperti hak aborsi,

anggapan laki-laki sebagai musuh bersama, dan buruk sangka terhadap lembaga perkawinan dan agama, berlawanan langsung dengan ideologi utama Nasyyiatul 'Aisyiyah yang ditopang oleh pedoman Islam yang kuat. Jadi intinya, posisi Nasyyiatul 'Aisyiyah dalam menanggapi feminisme, berada di "tengah-tengah".

Sikap Nasyyiatul 'Aisyiyah pada dasarnya memiliki sinkronisasi dengan wujud budaya perempuan Indonesia yang mandiri, kreatif & inovatif, memiliki jiwa pemimpin, bebas nilai, dan berpedoman pada agama. Kesemuanya memiliki keselarasan dengan nilai perjuangan Nasyyiatul 'Aisyiyah sebagai sebuah gerakan kepemudaan wanita. Hanya saja ketika dibenturkan dengan feminisme yang membawa nilai-nilai penomor duaan agama, lesbianisme, dan kecurigaan pada lembaga perkawinan, Nasyyiatul 'Aisyiyah kemudian menemukan hambatan. Hambatan tersebut kemudian Nasyyiatul 'Aisyiyah tanggulangi dengan program-program yang berjalan. Penomor duaan agama diantisipasi melalui pembangunan pendidikan sejak usia dini, kecurigaan pada lembaga perkawinan dan penganggapan laki-laki sebagai pesaing juga di sikapi dengan penanaman advokasi perempuan dan sosialisasi kesehatan reproduksi yang menyertakan laki-laki sebagai mitra. Hanya untuk ranah lesbianisme, Nasyyiatul 'Aisyiyah belum masuk pada diskursus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Margaret L., 1983. *Thinking About Women: Sociologist and Feminist Perspectives*, New York: Macmillan.
- Arrivia, Gadis. 2006. *Feminisme; Sebuah Kata Hati*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Baha'uddin dkk. 2010. *'Aisyiyah dan Sejarah Pergerakan Perempuan Indonesia: Sebuah Tinjauan Awal*. Yogyakarta: Jurusan Sejarah FIB UGM.
- Beauvoir, Simone de. 1988. *The Second Sex*. London: Pan.
- Betke. 2002. *Statistik Ketahanan Sosial: Menuju Operasionalisasi Baru dalam Bidang Statistik Sosial*. Depsos.
- Creswell, W. John. 2013. *Penelitian Kualitatif dan Design Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dale, Ernest. 1952. *Planning and Developing the Company Organization structure*. New York: American Management Association.
- Engels, Friedrich. 1972. *The Origin of the Family*. New York: International Publishers.

- Freud, Sigmund. 1966. *Sexuality and the Psychology of Love*. New York: Collier Books.
- Gamble, Sarah. 2010. *Feminisme dan Post-feminisme*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Hidayatullah, Syarif. 2010. *Teologi Feminisme Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Holland, Nancy. J. *Feminist Interpretation of Jacques Derrida*. Philadelphia: Pennsylvania State University.
- Heraty, Toetty. 2000. *Calon Arang, Kisah Perempuan Korban Patriarki*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Humm, Maggie. 1986. *Feminism Criticism*. New York: St. Martin Press.
- Jaggar, Allison M. 1998. *A Companion to Feminist Philosophy*. Oxford: Blackwell.
- Kadariusman, 2005. *Agama, Relasi Gender, & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Lemhanas RI, 1997, *Ilmu Kewiraan*, Jakarta: Gramedia.
- _____, 2008, *Bidang Studi/Materi Pokok Geostrategi dan Tannas*, Modul 3 Konsepsi dan Tolak Ukur Ketahanan Nasional, Jakarta.
- Lerner, Gerda, 1986, *The Creation of Patriarchy*, New York: Oxford University Press. \
- Majelis Tarjih PP Muhammadiyah. 2005, *Wacana Fiqh Perempuan dalam Perspektif Muhammadiyah*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka Jakarta.
- _____, 2010, *Adabul Mar'ah Fil Islam*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Manan, Azzam. "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia sebagai Sebuah Problem Kontemporer" dalam Jurnal LIPI tahun 2011.
- Matsumoto, David, 2000. *Culture and Psychology, People Around the World*. San Francisco: San Francisco University.
- McRobbie, Angela. 2011. *Postmodernisme dan Budaya pop*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Muchlas, Makmuri. 2008. *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: UGM Press.
- Muflihati, Abidah, "Posisi Nasyyatul Aisyiyah di Antara Polarisasi Gerakan Perempuan", Suara Muhammadiyah No. 14, Juli 2012.
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Tanpa tahun penerbitan. *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan 'Aisyiyah*. Yogyakarta: SKPP Aisyiyah.
- Pringgodigdo, A.K. 1960. *Sejarah Pergerakan rakyat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Rakyat.

- Rahayu, Ruth Indiah. "Politik Gender Orde Baru: Tinjauan Organisasi Perempuan sejak 1980-an" dalam Prisma edisi 5 Mei 1996.
- Rahmawati, Dian Eka. 2011. *LSM Perempuan & Gerakan Feminisme*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Ritzel, George. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana.
- Rueda, Marissa. 2007. *Feminisme untuk Pemula*. Yogyakarta: Resistbook.
- Saiful, Hamdi. 2011. *Fenomena Gerakan Feminisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Gerakan feminisme Islam di Pesantren Al-Muayyad Solo*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Sholikhah, Amiratun. 2005. *Perilaku memilih Partai Politik Elit 'Aisyiyah Pasca Orde Baru*. Tesis: Universitas Gadjah Mada.
- Soekarno, 2014. *Sarinah*. Yogyakarta: Penerbit Media Presindo.
- Soetarso. 1991. *Praktek Pekerjaan Sosial dalam Pengembangan Masyarakat*. Bandung: KOPMA STKS.
- Strauss, A., & J. Corbin. (1998). *Basics of Qualitative Research: Technique and Procedures for Developing Grounded Theory*. London: Sage Publications, Inc.
- Stuart Mill, John. 2005. *On Liberty: Perihal Kebebasan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sulistyo-Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.
- Suradi, 2005. *Perubahan Sosial Budaya*. Surabaya: Swastika Media Cipta.
- Suryakusuma, Julia. *Ibuisme Negara*, Depok: Komunitas Bambu.
- Tong, Rosemary, 2008. *Feminist Thought*, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ulfah Subadio, Maria. 1994. *Peranan dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Wollstonecraft, Mary. 1975. *A Vindication of the Rights of Women*. New York. WW Worton.
- Wierenga, Saskia. E. 2010. *Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI*. Yogyakarta: Galang Press.